

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia sudah banyak yang dimanfaatkan untuk pariwisata. Saat ini pariwisata menjadi sektor penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana, pariwisata dapat dikatakan sebagai sumber yang potensial bagi daerah dan menjadi sandaran daerah dalam mengembangkan ekonomi daerah. Melalui pengelolaan pariwisata, perekonomian juga bisa dihidupkan kembali. Sektor pariwisata juga memudahkan suatu negara dalam memperkenalkan potensi yang negara miliki kepada wisatawan. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu bekerja sama untuk melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi yang akan dijadikan obyek wisata. Salah satunya dengan cara membuat sebuah inovasi baru yang bisa menarik minat para wisatawan yang akan berkunjung agar mau berkunjung. Contoh inovasi dalam pariwisata yang sudah dibangun oleh berbagai negara untuk menarik para wisatawan ialah *cable car* atau kereta gantung. Hal ini dilakukan demi menggenjot pendapatan lewat sektor pariwisata itu sendiri.

Cable car sendiri merupakan salah satu transportasi yang menggantung dan berjalan di lintasan kabel lurus yang menghubungkan satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya. Kereta gantung biasanya dinaiki oleh para wisatawan dengan tujuan supaya bisa lebih menikmati pemandangan dari sisi atas. Awalnya, kereta gantung dibangun di tempat wisata yang dingin. Terutama daerah pegunungan yang bersalju. Untuk saat ini *cable car* sendiri sudah mulai berkembang di berbagai tempat (www.goodnewsfromindonesia.id, diakses pada 5 Oktober 2019). Beberapa negara sudah menjadikan *cable car* sebagai obyek wisata. *Cable car* yang ada di Indonesia

belum sebaik yang ada di negara lainnya. Tidak menutup kemungkinan inovasi kereta gantung akan diperbanyak lagi di Indonesia. Jelasnya kereta gantung ini bisa dijadikan agenda dalam meningkatkan kunjungan serta pendapatan ekonomi yang sumbernya berasal dari sektor pariwisata. Apalagi kawasan Kawah Ijen itu masuk jajaran KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional) yang dalam hal pengelolaan juga langsung berasal dari pemerintah di pusat.

Tapi, wacana inovasi pembangunan pariwisata berbasis ekowisata berupa *cable car* tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014. Wacana proyek *cable car* ini menemukan titik terang kelanjutannya itu pada tahun 2017 dan direncanakan selesai pada tahun 2020. Beberapa pihak sudah melakukan rapat seperti Bupati, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim dari Kementerian Pariwisata termasuk Tim Percepatan Pembangunan Ekowisata, pihak swasta, dan akademisi (bappeda.banyuwangikab.go.id, diakses pada 11 Januari 2021). Nantinya, pembangunan *cable car* tersebut akan membutuhkan wilayah yang lebih luas dan kemungkinan akan menyebabkan penurunan kembali status kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam Kawah Ijen sekitar 250 sampai 300 hektar. *Cable car* yang akan dibangun merupakan kombinasi *funicular* (kereta tebing yang menanjak). Selanjutnya, *cable car* sendiri akan dibangun sepanjang 2,3km dan terbagi menjadi dua sesi. Kemudian akan ada sekitar lima stasiun yang dimana untuk stasiun 1, 2, 3 akan menggunakan *cable car*. Sedangkan, untuk stasiun 4 dan 5 menggunakan *funicular* (www.banyuwangibagus.com, diakses pada 11 Januari 2021). Perlu diketahui juga bahwasanya pembangunan *cable car* Taman Wisata Alam Kawah Ijen tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – kawasan Bromo – Tengger – Semeru – serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam lampiran tersebut tidak menjelaskan begitu detail mengenai proyek ataupun program pembangunannya seperti apa. Tapi, pembangunan *cable car* di Selingkar Ijen tersebut masuk sebagai salah

pendukung kawasan Bromo – Tengger – Semeru. Dimana, estimasi nilai investasi sekitar 350,00 (Rp miliar) yang dananya sendiri bersumber dari KPBU.

Dengan adanya *cable car* ini nantinya akan bisa membuat wisata Kawah Ijen menjadi setara dengan wisata kelas dunia. Proyek besar yang jelas akan memakan waktu, biaya, dan juga wilayah ersebut akan dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA) dan PT Sura Parama Setia (SPS) sebagai pihak yang memfasilitasi. Selain itu walau nantinya sudah ada *cable car*. Fungsi kawasan Kawah Ijen adalah cagar alam (kawasan konservasi) dan taman wisata alam akan tetap dijaga ketika sudah dimanfaatkan untuk segala kegiatan pariwisata (republika.co.id, diakses pada 5 Oktober 2019). Namun dipastikan juga terkait keamanan *cable car* sudah terjamin aman. Hal ini dikarenakan *cable car* akan dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kerusakan yang terkoneksi dengan jaringan *fiber optic*. Sehingga, apabila ada masalah pada *cable car* bisa langsung terdeteksi (republika.co.id, diakses pada 11 Januari 2021).

Untuk Kawah Ijen sendiri berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (RIPP Kabupaten Banyuwangi) dan Konsep Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam kategori *The Diamond Triangle* dan menjadi pusat Wilayah Pengembangan Pariwisata I (WPP I) di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi, proyek ataupun program *cable car* Kawah Ijen sendiri belum ada dalam peraturan baik Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011. Namun yang pasti, pembangunan pariwisata di Banyuwangi harus dilakukan sesuai dengan visi daerah yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 – 2025 yakni, *Ekowisata Terpadu*.

Terkait dengan perizinan sudah didapatkan, akan tetapi ketika diajukan kembali dengan laporan yang lebih detail ke pihak yang mempunyai wilayah, yakni

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru masih ditolak. Namun, apabila ingin membangun di kawasan konservasi, tentu harus ada penurunan status kawasan terlebih dahulu. Terlebih kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen memiliki dua status kawasan, yaitu cagar alam dan taman wisata alam. Sehingga jika sudah ada keputusan dan izin untuk diturunkannya status dari cagar alam menjadi taman wisata alam, maka baru bisa dilakukan berbagai kegiatan pembangunan. Apalagi, kawasan Kawah Ijen sangatlah sensitif menyangkut polemik lingkungan dan juga kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat (republika.co.id, diakses pada 11 Januari 2021).

Selain itu, dulunya juga sudah pernah ada pembangunan di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Pembangunan tersebut merupakan program DIPA milik pengelola kawasan yang dilakukan di sekitar puncak Kawah Ijen. Untuk pembangunannya sendiri berupa infrastruktur pendukung pariwisata. Sayangnya, program DIPA tersebut tidak begitu mendapat respon yang baik oleh beberapa pihak. Bahkan, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM salah satu kampus di Kabupaten Banyuwangi melakukan aksi demo penolakan. Bukan hanya para mahasiswa, melainkan para kelompok kepentingan lokal juga ikut bertindak. Mereka menolak adanya segala kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen termasuk proyek pembangunan *cable car* yang isunya muncul bersamaan dengan program DIPA. Hingga saat ini belum ada kejelasannya seperti apa terkait proyek pembangunan *cable car* dan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelompok kepentingan menyikapi akan adanya pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen?
2. Bagaimana strategi kelompok kepentingan membangun jejaring sebagai kekuatan dalam memperjuangkan kepentingannya terkait pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen?

3. Bagaimana dinamika tarik - menarik kelompok kepentingan dalam pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sikap kelompok kepentingan akan adanya pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.
2. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui strategi kelompok kepentingan dalam membangun jejaring sebagai kekuatan dalam memperjuangkan kepentingannya terkait pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.
3. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dinamika tarik - menarik kelompok kepentingan dalam pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka dari itu, penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian lainnya yang membahas pembahasan yang sama. Lalu, penelitian ini juga bisa memberikan sumbangan secara teoritis bagi implementasi maupun pengembangan program studi Ilmu Politik khususnya yang membahas mengenai *kelompok kepentingan*. Terlebih pada tema seperti penelitian ini sangatlah jarang ditemukan di program studi Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini jika secara praktis diharapkan bisa memberikan kontribusi informasi dalam pemahaman dan pemikiran yang akan dibagikan kepada masyarakat hingga para pembaca penelitian skripsi ini terkait isu *kelompok kepentingan* di Kabupaten Banyuwangi. Terlebih lagi mengenai respon dari kelompok kepentingan dalam menanggapi terkait proyek pembangunan pariwisata yang juga ternyata bisa mengancam kelestarian lingkungan yang ada.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Konsep Respon

Secara etimologis respon berasal dari kata *response* yakni bentuk dari reaksi, tanggapan, atau jawaban seseorang atas suatu fenomena yang terjadi (Suryabrata, 1995: 36). Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi respon. Kalau dari sudut pandang Djalaludin Rakhmat yang lebih mengartikan respon tersebut sebagai aktivitas dari organisme yang tidak hanya berupa gerakan yang positif. Lalu, biasanya aktivitas yang justru ditimbulkan oleh rangsangan (Rakhmat, 1999: 51). Selanjutnya menurut Saifuddin Azwar, respon ialah bentuk reaksi maupun jawaban tergantung pada stimulus. Respon ini akan muncul ketika individu dihadapkan pada hal yang memancing untuk adanya reaksi. Biasanya respon berbentuk baik dan buruk, setuju dan tidak setuju, positif atau mungkin negatif (Azwar, 2015: 14). Kalau menurut Sulasmono, pengertian respon adalah tanggapan yang muncul dari individu setelah memperhatikan, menilai, memahami, dan menerima rangsangan yang menjadi obyek dari respon tersebut (Sulasmono, 1994). Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut bahwasanya kalau respon adalah bentuk reaksi, tanggapan yang diperoleh dari hasil penilaian baik berupa kritik maupun saran individu yang membentuk sikap yang bisa memilih senang atau justru membenci terhadap suatu fenomena yang menjadi

stimulus dan biasanya dengan diikuti tindakan. Respon terbagi menjadi tiga macam menurut Steven M Chafe, sebagai berikut :

1. Kognitif (pendapat) : Respon yang didasarkan pada pengetahuan keterampilan dan informasi yang berhubungan langsung dengan pikiran maupun penalaran individu mengenai suatu hal. Nantinya respon ini muncul ketika ada perubahan akibat pemahaman dari pihak lain;
2. Afektif (perasaan) : Respon yang melibatkan emosi individu dalam menilai sesuatu. Nantinya emosi ini membentuk sikap akan positif atau malah negatif terhadap sesuatu;
3. Konatif (berperilaku) : Respon yang berhubungan dengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi sesuatu kegiatan, tindakan, kebiasaan perilaku. Hal ini biasanya ditentukan oleh adanya stimulus. Kecenderungan berperilaku secara konsisten juga akan membentuk sikap individu (Rakhmat, 1999 : 118).

Dapat dikatakan bahwasanya respon itu membentuk sikap. Bahkan, menurut Desrita menerangkan kalau dalam prosesnya memang respon itu tidak lepas dari pembahasan tentang sikap (Arifiani, 2018). Maka dari itu, pengertian sikap itu sendiri menurut Isnaini dan Siregar ialah reaksi atas rangsangan terhadap suatu obyek yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung ataupun menolak (Arifiani, 2018). Hal ini juga sama dikatakan oleh Schiffman dan Kanuk yang mengartikan sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*) yang mencerminkan seseorang (Simamora, 2004). Menurut Kusri terdapat faktor berhubungan dengan sikap, antara lain :

- 1) Karakteristik lingkungan sosial : Ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi sikap. Dimana, lingkungan sosial berarti berupa bentuk dukungan dari tokoh masyarakat, peran kelompok, dan intensitas dari

kegiatan. Dimana, peranan keberadaan adanya kelompok itu sangat berpotensi berperan penting dalam membentuk perilaku anggota dan menjalin kerjasama dalam kelompok;

- 2) Terkait bagaimana pengelolaan programnya itu sendiri;
- 3) Karakteristik personal yang melekat pada individu yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan tersebut (Mulyanti, 2016).

Selanjutnya, menurut Engel sikap mempunyai lima dimensi, yakni :

1. Dimensi Arah : Arah cenderung berkaitan dengan sikap yang biasanya terbagi menjadi dua ketika ada stimulus. Entah akan bersikap baik atau buruk dan lain sebagainya;
2. Dimensi Ekstremitas : Dimensi ini terkait dengan intensitas yang tercermin dalam kekuatan sikap entah mengarah kemana yang didasari oleh perasaan;
3. Dimensi Resistensi : Kalau dimensi ini berhubungan dengan tingkat kekuatan dari sikap untuk tidak berubah sesuai dengan pernyataan arah sikap yang dipilih dan jelasnya selalu konsistensi antar waktu;
4. Dimensi Persistensi : Lebih pada sikap itu bisa berubah secara gradual yang diakibatkan oleh waktu. Dimana, sikap berubah seiring dengan perjalanan waktu;
5. Dimensi Tingkat Keyakinan : Seberapa yakin individu akan kebenaran sikap. Apabila sikap diikuti oleh tingkat keyakinan yang tinggi. Maka, akan sulit berubah dan dapat lebih mudah untuk diwujudkan dalam perilaku (Mulyanti, 2016).

1.5.2. Konsep Kelompok Kepentingan

Menurut Varma SP, masyarakat itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Pertama*, sekelompok kecil memiliki kualitas sehingga bisa berkesempatan

untuk menempati posisi memerintah. *Kedua*, sekelompok besar atau massa yang biasanya hanya bisa diperintah (S.P, 2003: 197). Pengertian kelompok itu sendiri menurut Devito ialah sekumpulan orang – orang dalam lingkup relatif kecil yang terhubung karena tujuan yang sama dan dibatasi organisasi (DeVito, 2002). Selanjutnya, Syamsu mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih berinteraksi secara intensif yang sadar bahwa mereka adalah bagian dalam kelompok dan teratur demi mencapai tujuan bersama yang sudah menjadi target bersama (Syamsu et al, 1999). Kemudian, kelompok juga diartikan oleh Fiedler merupakan sekumpulan individu yang bernasib sama dan saling bergantung satu sama lainnya. Lalu, Bonner mengartikan kelompok, yakni sejumlah orang yang menjalin interaksi dengan pola interaksi yang jelas membedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya (Yusuf, 2009). Selain itu, Mills mengartikan kelompok sebagai suatu unit yang dimana bisa saja terdiri dari dua orang atau lebih berada dalam satu lingkup tujuan yang sama (Huraerah dan Purwanto, 2006: 4). Kelompok juga dipahami sebagai bentuk dari interaksi dan interpendensi antar anggota kelompok dengan yang lainnya yang menghasilkan *feedback* dinamis atau keteraturan yang jelas dalam hubungan psikologis. Intinya dari beberapa penjelasan mengenai kelompok, dapat ditarik simpulan bahwasanya kelompok adalah sekumpulan individu yang terdiri dari lebih dari dua orang yang mempunyai persamaan tujuan dan pemikiran yang tergabung dalam unit komunitas dengan norma, struktur, fungsi, peran, dan tugas yang jelas demi tercapainya tujuan bersama melalui interaksi dan interpendensi.

Menurut pandangan Marvin ada beberapa ciri – ciri kelompok yang lebih spesifik, antara lain Persepsi dan Kognisi Anggota Kelompok, Motivasi dan Kebutuhan Kepuasan (*need satisfaction*), Tujuan Kelompok, Struktur Kelompok, Interpendensi dan Interaksi (Yusuf, 2009). Sedangkan, menurut Soetarno kelompok mempunyai ciri – ciri, sebagai berikut :

- 1) Dalam kelompok tiap anggota memiliki persamaan motif;
- 2) Sikap *In-group* dan *Out-group*;
- 3) Solidaritas;
- 4) Memiliki struktur kelompok yang jelas;
- 5) Jelasnya setiap kelompok ada norma (Huraerah dan Purwanto, 2006: 6 - 8).

Kelompok kepentingan itu sendiri menjadi salah satu kekuatan penting dalam bingkai politik. Dimana, melalui adanya kelompok kepentingan sistem politik bisa lebih dinamis memunculkan persaingan dalam masyarakat. Kelompok kepentingan itu sendiri diartikan sekumpulan individu yang mempunyai persamaan baik dari segi sifat, sikap, tujuan yang terorganisir dengan baik untuk bisa mencapai dan melindungi tujuannya. Kelompok kepentingan sendiri jelas memiliki sistem keanggotaan, terdapat pola kepemimpinan juga, bahkan untuk urusan keuangan ada sendiri sumbernya dalam rangka membiayai segala kegiatan yang akan diselenggarakan, dan tentunya memiliki pola komunikasi dengan lainnya. Perlu dijelaskan bahwasanya kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik apalagi dengan kelompok penekan lainnya. Pada dasarnya fokus utama dari kelompok kepentingan sendiri ada pada mengartikulasikan kepentingan tertentu untuk diajukan ke pemerintah yang nantinya pemerintah bertindak menyusun kebijakan atas hal tersebut. Orientasinya cenderung kepada proses perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Dikarenakan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jelas harus dilaksanakan oleh semuanya. Memang dalam masyarakat, banyak sekali perbedaan kepentingan, sehingga kelompok kepentingan disinilah yang nantinya bertindak mengajukan pada pemerintah untuk bisa dibuatkan kebijakan umum yang menjadi keputusan politik yang sah (Surbakti, 2010: 140).

Menurut Gabriel Almond ada empat macam kelompok kepentingan yang didasarkan gaya dan metode dalam mengajukan kepentingannya, yaitu ;

- a) Kelompok Kepentingan Anomik biasanya mengajukan kepentingan yang ingin dicapai secara spontan menginginkan adanya tindakan langsung. Biasanya kelompok anomik bersifat cuma sementara dan tidak ada norma atau sistem yang jelas. Tidak mempunyai jejaring baik dari partai politik maupun institusi;
- b) Kelompok Kepentingan Non Asosiasi terbentuk karena adanya persamaan kepentingan yang sedang diperjuangkan. Tidak terorganisir atau teratur. Kalaupun sudah tercapai kepentingannya kelompok ini bubar. Karena hal itu kegiatan yang mereka lakukan sifatnya hanya insidental. Biasanya mereka melakukan pendekatan pada pemerintah;
- c) Kelompok Kepentingan Institusional justru muncul sekitar lembaga - lembaga politik atau pemerintahan yang sebenarnya berfungsi tidak pada kepentingan. Berkaitan juga pada proses penyusunan kebijakan yang berjangka besar dikarenakan mereka mempunyai pengaruh kuat karena basis kelompok yang juga kuat untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang pemerintah buat;
- d) Kelompok Kepentingan Asosiasional berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok dan masyarakat melalui strategi dan tujuan. Sehingga, kelompok seperti ini terorganisir dengan baik dan terjalinnya hubungan baik antar anggota kelompok maupun dengan pemerintah secara baik (Surbakti, 2010: 141).

Bukan hanya itu saja, melainkan dalam kelompok kepentingan baik dari segi *internal* maupun *eksternal* perlu dipelajari. Misalnya saja dari segi *internal* itu kelompoknya bisa dilihat dari sisi keanggotaannya, terus juga seberapa besar loyalitas anggotanya, keseriusan kegiatan yang dilakukan, termasuk cara memperjuangkan tuntutan hingga sumber daya baik secara *materiil* maupun manusia untuk bisa mencapai apa yang dituju. Beda hal dengan segi *eksternal* itu kelompok lebih cenderung membahas mengenai tujuan dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh kelompok kepentingan harus sejalan dengan budaya politik yang berlaku, prosedur, dan komunikasi dengan pemerintah (Surbakti, 2010: 142).

Berdasarkan hakekatnya kelompok kepentingan juga diklasifikasikan, sebagai berikut :

- a) Kelompok Kepentingan Privat yang diartikan sebagai kelompok yang memperjuangkan segala kepentingan golongan tertentu yang bersifat umum;
- b) Kelompok Kepentingan Publik yang diartikan sebagai kelompok yang konteksnya bisa mempengaruhi pemerintah, supaya tindakan yang diambil nantinya berguna untuk semua orang.

Kelompok kepentingan itu memiliki kekuatan dari para anggotanya. Dalam bentuk dana maupun jaringan. Biasanya kelompok kepentingan inilah yang sering melakukan penggalan dalam perumusan kebijakan, biasanya mendesak pemerintah, sebagai penentu agenda, dan lain sebagainya (Maiwan, 2016: 77 - 78).

Tujuan dari kelompok kepentingan bisa dibagi antara lain, seperti berikut ini :

- a) Ada yang mempengaruhi agenda politik;
- b) Ikut dalam proses politik;
- c) Memberikan edukasi bagi individu atau masyarakat untuk lebih sadar dengan isu yang sedang terjadi;
- d) Mengarahkan tindakan atas reaksi terkait isu yang sedang terjadi;
- e) Mengawasi kinerja pemerintah termasuk memberikan kritik dan saran (Maiwan, 2016: 82).

Selanjutnya, kelompok kepentingan mempunyai strategi komunikasi yang berbeda – beda. Berikut merupakan beberapa strategi komunikasi kelompok kepentingan, antara lain :

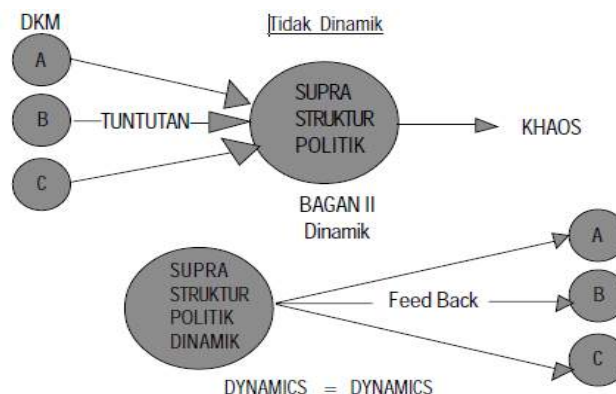
1. *Lobbying* : Menyampaikan langsung pada pemerintah atas kepentingan yang sedang diperjuangkan;
2. Media Massa : Efektif untuk menggiring opini publik Sehingga pemerintah cepat merespon dan mengambil keputusan selanjutnya. Cara ini bisa dibidang komunikasi secara tidak langsung;
3. *Grass-Roots Pressure* : Dimana, kelompok kepentingan mengajak masyarakat untuk menyampaikan bersama atas kepentingan yang sedang diperjuangkan secara langsung dengan pemerintah melalui berbagai aksi. Ini konteksnya terbatas, sehingga bisa saja manipulatif dan sangat situasional (Maiwan, 2016: 83 – 84).

1.5.3. Konsep Dinamika

Dalam Ilmu Politik, istilah dinamika diartikan dengan *Dynamic* dan juga *Dynamics*. Untuk arti kata *Dynamic* sendiri bermakna dinamik, dinamis atau selalu semangat. Sedangkan, *Dynamics* lebih bermakna gerakan (Bailusy, 2000). Kalau menurut Slamet Santoso mengartikan dinamika sebagai bentuk tingkah laku dari masyarakat secara langsung yang dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya secara dua arah. Ini merupakan gambaran interaksi dan interpedensi dalam anggota kelompok secara keseluruhan (Santoso, 2004: 5). Kemudian, Suardi mengartikan dinamika itu terdapat hubungan antara kekuatan serta aspek pekerjaan kelompok. Dinamika kelompok acuannya pada kekuatan interaksi yang terjadi pada kelompok yang ditata dan kemudian dilaksanakan demi tercapainya tujuan bersama (Rusmana, PPB-UPI). Dinamika sendiri bermakna sebagai bentuk upaya manusia yang tiada batas akan berbagai macam dorongan baik dari luar atau tuntunan yang berasal dari dalam kelompok masyarakat. Jika ada tuntutan atau dukungan yang diberikan langsung secara spontan itu

merupakan gambaran dinamika masyarakat. Tuntutan bisa berasal dari individu, kelompok masyarakat terhadap *suprastruktur politik* (Bailusy, 2000). *Suprastruktur politik* terdiri dari lembaga – lembaga pemerintahan. Jelasnya ketiganya yang mencakup *eksekutif*, kemudian *legislatif*, dan terakhir *yudikatif* juga. Kalau di Indonesia *suprastruktur politik* itu tidak hanya berada di pusat melainkan juga mencakup yang ada di daerah – daerah. Tidak hanya ada *suprastruktur politik* dalam sistem politik di Indonesia, melainkan juga *infrastruktur politik* yang terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, dan media massa. Ini menjadi mesin politik informal (Setiawan, 2013). Sebenarnya dinamika tuntutan tidaklah bermaksud untuk mengacaukan apa yang sudah dilakukan negara, melainkan supaya ada perbaikan dalam struktur yang tidak mengakibatkan khaos dalam masyarakat (Bailusy, 2000). Intinya apabila dalam masyarakat terdapat tuntutan atas kepentingan politik bisa dikatakan sebagai implementasi dinamika. Seharusnya, supaya hubungan dikatakan dinamis antara *suprastruktur* dan *infrastruktur politik*, maka pihak *suprastruktur politik* bisa menjemput berbagai tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Kalau *infrastruktur politik* yang sering menyampaikan tuntutan dukungan pada *suprastruktur politik*. Maka dinamika hubungannya tidak bisa dikatakan dinamis karena ada keseimbangan tuntutan yang bisa menyebabkan *balance of power*. Maka dari itu, perlu semangat *suprastruktur politik* untuk menanggapi *infrastruktur politik* harus lebih besar. Namun, kalau semangatnya lebih kecil justru yang terjadi khaos dalam masyarakat (Bailusy, 2000).

Gambar 1.1 Konsep Dinamika



Sumber: simposiumjai.ui.ac.id

Sedangkan, tuntutan yang dimaksud lebih sering berbentuk gerakan sosial. Dimana, sifat dari gerakan sosial adalah menuntut adanya perubahan dalam struktur institusi, jabatan atau suatu kebijakan. Ada salah satu contoh gerakan sosial baru yang menyangkut dengan pembahasan mengenai hal ini adalah gerakan lingkungan hidup. Dimana, gerakan ini muncul sekitar abad ke-70 atau ke- 80. Munculnya gerakan ini dikarenakan adanya kelompok – kelompok kepentingan yang mementingkan kepentingan masyarakat umum melalui masalah lingkungan. Selain itu, batas antara kelompok kepentingan juga jelas dengan kekuasaan. Sehingga banyak dukungan dari publik yang mempengaruhi kekuasaan (Apriwan, 2011: 37). Lalu, gerakan lingkungan hidup ini juga menyadarkan dengan pemikiran Karl Marx mengenai bencana alam masih terjadi jika manusia masih melakukan yang merugikan kaum miskin (Apriwan, 2011: 39). Selain itu, gerakan lingkungan hidup juga lebih mengarah pada promosi sebagai bentuk strategi membangun supaya ada perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kapasitas negara terkait gerakan – gerakan yang menjaga sumber daya alam. Gerakan lingkungan hidup ini juga membuat negara bertindak untuk membuat pertumbuhan ekonomi terjadi sehingga tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh dengan cara menyediakan edukasi

dengan topik lingkungan, regulasi, pengeluaran, dan memperbaiki kekayaan alam yang sudah dieksploitasi (Christoff, 1995: 159). Gerakan lingkungan hidup sendiri dibagi menjadi tiga komponen, yaitu :

- a. Dalam hal ini *Public Environmentalist* adalah bentuk gerakan didasari oleh masyarakat yang berusaha untuk mengubah kondisi lingkungan yang lebih baik. Memang hanya di Indonesia justru biasanya muncul dari *bottom to up* untuk merespon terkait perbaikan isu yang mengancam lingkungan.
- b. Lain hal dengan *Organized Environmentalist* atau *Voluntary Environmentalist* ialah gerakan dari organisasi yang terstruktur khusus yang bergerak dalam hal lingkungan hidup seperti halnya NGO, yakni WALHI, *Green Peace*, dan lainnya.
- c. Sedangkan, *Institutional Environmental Movement Organization* merupakan gerakan lewat lembaga formal layaknya birokrasi pemerintah, dimana berwenang atas masalah lingkungan atau partai politik sebagai transportasi politik sebagai bentuk formal kekuasaan negara (Aditjondro, 2003: 166).

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. *The Dynamic of Contention*

Perlu diketahui bahwasanya dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok jelasnya mempunyai kepentingan – kepentingan yang ingin dicapai. Sehingga, tidak menutup kemungkinan kalau dalam prosesnya selalu menimbulkan pertikaian. Hal tersebut sesuai dengan kajian perpolitikan yang membahas mengenai politik perseteruan (*contentious politics*), yang dimana menjadi titik awal kemunculan suatu gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mengubah suatu kondisi, baik sosial maupun politik. Selain itu, *contentious politics* juga diartikan sebagai bentuk aksi rakyat untuk melakukan perlawanan

kepada pihak yang mempunyai kekuasaan. Bahkan, *contentious politics* dimaknai khusus oleh berbagai akademisi sosial-politik. Seperti halnya, Charles Tilly yang mengartikan *contentious politics* sebagai aksi yang mengganggu aktivitas masyarakat. Contohnya seperti demonstrasi, pemberontakan, revolusi, dan lainnya (Tilly, 2008). Sedangkan, Tarrow sendiri mengartikan *contentious politics* adalah aksi kolektif yang biasanya bisa berujung pertikaian, apabila dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak mempunyai akses untuk bisa menyuarakan atau mempertanyakan apa yang menjadi masalah kepada pihak yang memegang otoritas (Tarrow, 1998). Maka dari itu, konsep *contentious politics* ini tidak terlepas dengan kajian teori – teori gerakan sosial yang sudah ada, seperti halnya milik Doug McAdam, Charles Tilly, dan juga Sidney Tarrow (Lichbach 1998). Dimana, Sidney Tarrow menjelaskan bahwa gerakan sosial itu gambaran kelompok yang sudah mempunyai kesadaran untuk meyuarakan apa yang menjadi perhatiannya dengan cara melawan kelompok elit atau penguasa, dan lainnya. (Tarrow, 1994). Beda dengan pemikiran dari Doug McAdam dan David A. Snow yang mengartikan gerakan sosial itu tindakan protes yang dilakukan demi adanya perubahan bersama (Syawaludin, 2017: 34). Selanjutnya pandangan dari Charles Tilly yang mengartikan gerakan sosial itu sebagai serangkaian aksi perlawanan yang biasanya dilakukan terus – menerus atas nama pihak yang dirugikan atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan cara protes publik yang di luar jalur partisipasi politik yang formal secara hukum demi bisa menunjukkan gambaran kelompok yang sangat tinggi solidaritas, komitmen (Tilly dan Lesley, 2009). Adapun empat perspektif yang dijelaskan oleh Singh untuk memahami gerakan sosial, antara lain :

- a) Dari perspektif sudut proses politik, proses politik dan struktur mobilisasi;
- b) Dari perspektif mobilisasi sumber daya, proses *framing*;

- c) Dari perspektif perilaku kolektif;
- d) Dari perspektif gerakan sosial baru aliran Eropa Barat (Singh, 2010).

Dapat dikatakan bahwasanya *contentious* dan gerakan sosial adalah konsep yang saling berkaitan. Karena hal ini, ketiga tokoh Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly menyatukan pemikiran mereka dalam *The Dynamic of Contention* yang menjelaskan tiga komponen penting untuk menganalisa *contentious politics* atau gerakan sosial yang terdiri dari peluang politik, mobilisasi sumber daya, dan proses pemingkanaan (McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001). Ketiga komponen ini menggambarkan bahwa gerakan sosial dianalisis dari aspek ketidakpuasan atau keluhan yang tidak semua melahirkan sebuah protes perlawanan yang menimbulkan konflik, tetapi hal ini dianggap rasional karena mempertimbangkan *cost* dan *benefit* (Singh, 2010). Berikut ini penjelasan mengenai tiga komponen penting dalam *The Dynamic of Contention*, yakni :

1. *Political Opportunity Structure* : Menurut Tarrow dan Doug McAdam menjelaskan bahwa struktur kesempatan politik menjadi variable utama untuk dua hal, yakni momentum aksi kolektif serta hasil aktivitas sebuah gerakan (Situmorang, 2013). Konsep struktur kesempatan politik ini mencoba menjelaskan tentang muncul dan berkembangnya gerakan sosial yang disebabkan karena adanya perubahan struktur politik yang dimaknai sebagai peluang. Fokus dari struktur kesempatan politik adalah *power, domination, control*, dan juga *inequality*. Selain itu, struktur kesempatan politik secara umum terbagi menjadi dua kategori, antara lain :
 - a. Pola hubungan tertutup yang menghambat gerakan sosial
 - b. Pola hubungan terbuka justru membuka peluang bagi gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik yang kompetitif bagi siapa saja. Baik, elit, partai politik, maupun kelompok kepentingan (Muhtadi, 2011: 10).

McAdam dan Tarrow juga berpendapat bahwa ada empat variable tambahan dalam menerangkan struktur kesempatan politik, antara lain : (1) Akses terhadap lembaga politik terbuka, (2) Ketika keseimbangan politik mengalami masalah, justru keseimbangan politik baru belum terbentuk, (3) Konflik besar dipengaruhi oleh pelaku perubahan yang mempunyai kesempatan, (4) Pelaku perubahan menggalang dukungan supaya ada perubahan dalam sistem (Situmorang, 2013).

2. *Framing Process* : Merupakan proses yang berperan penting dalam pendefinisian masalah sosial sehingga terbentuk suatu gerakan sosial. Jika ada perbedaan pandangan dalam suatu peristiwa, maka perlu dilakukan mekanisme *framing* agar bisa menjadi satu pandangan tepat sasaran. Sehingga perlu ada *framing* yang tepat yang bisa mendorong mobilisasi massa menjadi lebih baik karena terbentuk opini yang sama ketika melakukan gerakan sosial. Dalam proses ini juga bisa melihat suatu peristiwa yang terjadi itu dianggap isu (masalah sosial) atau tidak. Melalui framing ini menjadi cara untuk meyakinkan publik untuk lebih memberikan perhatian lebih besar terhadap suatu peristiwa yang sangat krusial. Ada tiga perhatian utama dalam *framing process* menurut pemikiran Benford dan Snow, sebagai berikut :
 - a) *Diagnostic Framing* : memahami permasalahan apa saja yang menjadi isu utama dan butuh adanya perubahan;
 - b) *Prognostic Framing* : melakukan penolakan akan solusi yang sudah ditawarkan;
 - c) *Motivational Framing* : hasrat ikut terlibat dalam memperbaiki keadaan dengan tindakan kolektif (Benford dan Snow, 2000).
3. *Resources Mobilization* : Konsep ini membahas mengenai bagaimana kelompok dalam memanfaatkan *resources* yang mereka punya untuk melakukan sebuah perubahan sosial dan tercapai tujuan dari kelompok

tersebut (Edwards dan McCarthy, 2004). Jelasnya dalam melakukan gerakan sosial, para pelaku membutuhkan taktik dan juga sumber daya untuk bisa merealisasikan kegiatan kolektifnya tersebut. Bahkan, *resources mobilization* juga menjelaskan dua hal, antara lain, *pertama* mengenai ketersediaan sumber daya yang terdiri dari material dan non material, seperti halnya relasi (jaringan), solidaritas, kepercayaan, uang, pengetahuan, keahlian, termasuk nilai dan ideologi gerakan dan lain sebagainya yang bisa dikontrol secara individu atau kolektif dalam kelompok. Sedangkan, yang *kedua* terkait dengan maksud dari mobilisasi itu sendiri terkait dengan tidak terlepasnya para aktor dalam mencoba menggunakan sumber daya yang sudah dimilikinya untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari gerakan sosial. Kemudian, bisa juga ditambah lagi dengan dukungan baik dari opini publik atau elit, jumlah partisipan, publikasi media, maupun dana yang ada dalam organisasi para pelaku aksi kolektif tersebut (Porta dan Diani, 1998). Mobilisasi sumber daya mempunyai tiga faktor penting, diantaranya : (1) Dimana negara menciptakan dua kemungkinan, baik kesempatan atau hambatan dalam politik, (2) Adanya struktur mobilisasi kekuatan dari organisasi dan ikatan komunal maupun asosiasi yang menentang, (3) Perlawanan dilegitimasi oleh kerangka budaya ideologi (Lichbach, 1998). Dalam proses *resources mobilization* ini juga nantinya terjadi kegiatan bagaimana institusi, organisasi, dan asosiasi lokal juga ikut digunakan untuk memobilisasi gerakan (*mobilizing structural*). Akan tetapi proses ini jika masih dalam tahap *framing*, maka perlu memperhatikan ada dan tidaknya kesempatan atau ancaman, serta situasi lingkungan yang menurut McAdam dinamakan *The Repertoire of Contention*. Ini juga menjadi tanda bahwa secara budaya, orang – orang itu juga berinteraksi dalam perseteruan politik (McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001).

Tidak lepas juga melihat kondisi saat ini yang semakin meningkat rasionalitas masyarakat, yang disebabkan oleh keberhasilan dari pembangunan secara sosial dan ekonomi justru memicu banyak tantangan baru dalam birokrasi publik. Berbagai kritik dan saran dari elemen masyarakat tentunya tidak bisa dihiraukan lagi oleh pemerintah. Jika pemerintah menghiraukannya justru membuka peluang bagi masyarakat untuk menginginkan adanya perubahan yang menjadi tujuan dari para pelaku gerakan dan juga bisa menyebabkan pemerintah untuk kehilangan rasa simpati dari masyarakat. Banyaknya tuntutan maupun dukungan terhadap kualitas kebijakan maupun keputusan pemerintah yang semakin tinggi bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam perumusan dan perencanaan kebijakan untuk kedepannya. Sebelum kebijakan publik dihasilkan, maka harus melewati proses politik yang sangat panjang. Salah satu tahapannya adalah perumusan kebijakan. Ini menjadi langkah awal dalam proses politik dalam membuat kebijakan publik. Fase inilah yang menentukan akan berhasil atau tidak suatu kebijakan publik yang sudah dibuat oleh para *stakeholder*. Gambaran perumusan kebijakan publik yang baik dapat digambarkan berorientasi pada dua hal, yakni antara lain tahap implementasi dan evaluasi kebijakan. Dikarenakan sering terjadi kesalahpahaman ketika para pengambil keputusan yang masih beranggapan konseptual dengan ide yang sangat bagus tetapi tidak sesuai dengan harusnya (Putra, 2001). Secara konseptual, perumusan kebijakan isinya adalah opini publik dan suara publik. Hal ini diakibatkan karena kebijakan itu pada dasarnya tidaklah pernah bebas nilai karena selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang datang darimana saja. Adapun beberapa langkah dalam kebijakan publik menurut pandangan Ripley, sebagai berikut :

- a) *Agenda Setting*
- a. *Formulation and legitimation*
- b. *Program Implementations*

- c. *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
- d. *Decisions about the future of the policy and program* (Muadi dan Ismail, 2015: 201).

Selama proses perumusan kebijakan ada beberapa karakteristik penting yang termuat dalam implementasi kebijakan. Bahkan O'Jones juga menjelaskan kalau ada empat kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat dan ikut dalam proses perumusan kebijakan publik, antara lain :

- a) Terorganisasi dengan baik dan mempunyai akses yang mapan;
- b) Terorganisasi dengan baik dan tidak mempunyai akses yang mapan;
- c) Tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan;
- d) Tidak terorganisasi dengan baik dan juga tidak memiliki akses yang mapan (Muadi dan Ismail, 2015: 202).

Sedangkan untuk aktor – aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan publik secara umum terbagi menjadi dua, yaitu :

1. *Aktor Inside Government* : Berisi pihak – pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan (*stakeholder*) seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga birokrasi;
2. *Actor outside government* : Kalau ini meliputi elemen masyarakat yang terdiri dari kelompok kepentingan (LSM/NGO) atau kelompok ikatan pekerjaan profesional, kelompok buruh, kelompok bisnis, organisasi/lembaga keagamaan, akademisi, politisi, media massa, opini publik, kelompok yang menjadi target, atau bahkan lembaga – lembaga donor (Jones, 2007).

Dalam implementasi kebijakan jika terjadi kegagalan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak birokrasi. Maka dari itu, untuk para perumus kebijakan harusnya selalu bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat yang nantinya

akan terkena dampak suatu kebijakan (Islamy, 2001). Tentunya supaya kebijakan yang dihasilkan benar dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Maka, pemerintah harus menempuh jalur alternatif untuk membangun jaringan dengan para aktor di luar pemerintah yang disebut dengan aktor privat dan aktor *civil society*. Hal ini dikarenakan sudah tidak perlu lagi pemerintah menganggap mereka para aktor di luar pemerintah tersebut hanya sebelah mata dan menyebut mereka sebagai “*lawan politik*”. Justru seharusnya menjalin hubungan dan menjadikan mereka para aktor tersebut sebagai “*sahabat*” ketika membicarakan produk – produk kebijakan publik baik secara keseluruhan ataupun tidak. Selain itu, ada 10 nilai dasar dan tujuan yang bisa dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan publik, yakni sebagai berikut :

1. Kesadaran dan Keberlangsungan Ekologi
2. Demokrasi Akar Rumput
3. Keadilan Sosial dan Persamaan Kesempatan
4. Anti Kekerasan
5. Desentralisasi
6. Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan
7. *Feminisme* dan Kesetaraan Gender
8. Penghormatan Terhadap Keberagaman
9. Tanggung Jawab Personal dan Global
10. Fokus Pada Masa Depan dan Berkelanjutan (www.gp.org, diakses pada 20 Januari 2020).

Tentunya dengan berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbul sebuah *contentious politics* yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar pihak, baik itu individu maupun kelompok. Apalagi dalam pembahasan mengenai rencana pembangunan *cable car* di kawasan Kawah Ijen ini jelas perbedaan kepentingannya. Ini yang ditakutkan akan bisa menimbulkan ketidakharmonisan

antara pihak yang terlibat maupun pihak yang tidak terlibat. Maka dari itu, memang pada dasarnya konsep mengenai *contentious politics* menjadi asal munculnya suatu gerakan sosial. Diperkuat lagi bahwasanya konsep *contentious politics* erat kaitannya dengan teori – teori dari tokoh yang membahas mengenai gerakan sosial. Salah satunya pembahasan mengenai *contentious politics* yang dikembangkan kembali oleh ketiga tokoh seperti Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly dalam *The Dynamic of Contention* yang sangatlah relevan digunakan untuk menganalisa pembahasan penelitian ini. Dimana, ada tiga komponen yang menjadi fokus pemikirannya, antara lain: *Political Opportunity Structure*, *Framing Process*, dan *Resources Mobilization*. Dengan melihat gerakan sosial yang sudah pernah dilakukan menyangkut pembangunan di kawasan puncak Kawah Ijen pada tahun 2017 yang lalu, bisa dianalisa lagi dengan tiga komponen penting dalam *The Dynamic of Contention* yang kemungkinan ada peluang akan terjadi sebuah gerakan sosial sebagai taktik strategi yang sama terjadi kembali. Nantinya melalui analisa ketiga komponen tersebut, dapat dilihat apakah selama ini para pelaku yang melakukan gerakan bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial atau hanya aksi kolektif saja yang justru tidak berlangsung lama. Dengan tiga komponen tersebut peneliti bisa menganalisa terkait dalam pembangunan *cable car* ini para kelompok kepentingan yang pernah melakukan gerakan pada tahun 2017 tersebut sebenarnya mempunyai kesempatan politik atau tidak. Terlebih lagi kelompok kepentingan tidaklah mempunyai akses (sumber daya) untuk berinteraksi dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan *cable car* ini. Sehingga, melalui tiga komponen dalam *The Dynamic of Contention*, penulis bisa melihat apakah kelompok kepentingan sudah mempunyai sumber daya yang menjadi faktor utama bisa tercapainya perubahan yang menjadi tuntutan. Hal lain lagi, dasar perhatian kelompok kepentingan akan hal yang menjadi permasalahan harus benar – benar tepat. Supaya sumber daya yang sudah dimiliki bisa digunakan

dengan baik. Pasalnya jika melihat dengan tiga komponen ini juga memudahkan pertimbangan secara rasional baik *cost* dan *benefit* dari pembangunan tersebut.

Lebih lagi melihat kondisi saat ini yang semakin meningkat rasionalitas masyarakat, justru memicu berbagai tuntutan berupa kritik dan saran dari elemen masyarakat tentunya tidak bisa dihiraukan lagi oleh pemerintah. Jika pemerintah menghiraukannya justru membuka peluang bagi masyarakat untuk menginginkan adanya perubahan yang menjadi tujuan dari para pelaku gerakan dan juga bisa menyebabkan pemerintah untuk kehilangan rasa simpati dari masyarakat. Banyaknya tuntutan maupun dukungan terhadap kualitas kebijakan maupu keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu, para stakeholder harus mempunyai kemampuan dalam perumusan dan perencanaan kebijakan untuk kedepannya. Sebelum hasil keputusan politik yang berupa kebijakan publik yang dihasilkan oleh *stakeholder*, maka harus melewati proses politik yang sangat panjang. Salah satu tahapannya adalah perumusan kebijakan yang menjadi langkah awal dalam proses politik dalam membuat kebijakan publik. Fase inilah yang menentukan akan berhasil atau tidak suatu kebijakan publik yang sudah dibuat oleh para *stakeholder* dan banyak tahapan yang harus dilewati. Nantinya penulis bisa melihat rencana pembangunan *cable car* di sekitar kawasan Kawah Ijen itu sudah sampai pada tahap mana dan sudah sejauh apa peraturan yang mengatur tentang proyek inovasi pariwisata tersebut. Apalagi yang sudah kita ketahui bahwasanya pembangunan *cable car* justru tidak mencerminkan *ekosentrisme* seperti yang tercantum dalam peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan *cable car* bisa menjadi masalah sosial khususnya terkait dengan isu lingkungan yang harus diteliti lagi mulai dari dampak isu lingkungan yang berkaitan dengan proses politik, yang dimana negara ikut serta dalam mengelola lingkungan. Bukan hanya berfokus hanya pada manusia sebagai makhluk hidup, melainkan seluruh ekosistem juga harus diperhatikan. Dengan adanya proyek tersebut menunjukkan bahwasanya

memang kebijakan politik yang sudah dihasilkan oleh pemerintah tidaklah terlepas dari lingkungan. Sehingga, pada saat proses pembuatan kebijakan harusnya, pemerintah juga harus melakukan riset terkait lingkungan. Tetapi, jarang sekali pihak yang terlibat seperti pemerintah maupun swasta sangat minim menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Ditambah lagi, kekhawatiran para kelompok kepentingan yang *pro* akan lingkungan hidup adalah adanya kepentingan politik ekonomi. Apalagi memang ekonomi dan kapitalis dianggap sebagai perusak lingkungan. Dimana, negara biasanya mengabaikan lingkungan demi kepentingannya. Padahal seharusnya tetap dilestarikan demi keberlangsungan hidup kedepannya. Bahkan, sesuai formulasi kebijakan publik, bisa melihat siapa saja yang aktor dalam pembangunan *cable car* tersebut dan dikategorikan siapa yang masuk dalam kategori *aktor inside government* dan *aktor outside goverment*. Dengan ini peneliti bisa melihat tanggapan dari para aktor dalam menanggapi adanya pembangunan dan sampai dimana mereka mengetahui akan proyek tersebut. Nantinya juga peneliti bisa tahu bagaimana aktor tidak langsung seperti kelompok kepentingan bisa mempengaruhi apa yang dilakukan aktor langsung. Apalagi lingkungan sendiri tidak terlepas dari pengaruh politik.

Melalui proses tiga komponen *The Dynamic of Contention* ini juga akan tahu bagaimana kelompok kepentingan yang merupakan aktor tidak langsung dalam memperjuangkan kepentingannya membangun kekuatan untuk bisa mencapai kepentingan yang sedang diperjuangkan melalui konsep kelompok kepentingan. Ditambah lagi nantinya akan dibahas juga mengenai strategi mereka dalam berkomunikasi dengan aktor lain dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan serta proses tarik ulurnya demi tercapainya suatu kebijakan yang dihasilkan betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka, pemerintah harus menempuh jalur alternatif membangun jaringan dengan para aktor di luar pemerintah yang disebut dengan privat dan aktor *civil society*. Karena sudah tidak

perlu lagi pemerintah menganggap mereka para aktor di luar pemerintah sebelah mata dan melabeli mereka sebagai “*lawan politik*”. Justru haru menjalin hubungan dan menjadikan mereka para aktor tersebut sebagai “*sahabat*” ketika membicarakan produk – produk kebijakan publik baik secara keseluruhan. Disini, yang menjadi *actor outside government* seperti komunitas lokal yang ternyata bisa memberi perlindungan dan perawatan lingkungan, selain negara. Komunitas lokal disini diartikan sebagai kelompok kepentingan. Selain itu, jika strategi pembangunan demi pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya tidak didukung. Hal ini dikarenakan segala tindakan yang manusia lakukan itu berdampak pada keberlangsungan seluruh makhluk hidup di dunia. Sehingga, harus ada komitmen untuk berubah demi keberlangsungan lingkungan.

Walaupun isu pembangunan kereta gantung ini masih tidak jelas arahnya seperti apa, tetapi proyek tersebut ternyata sempat berjalan dan direalisasikan oleh pihak yang memfasilitasi, yakni PT. Sura Parama Setia. Terlebih lagi jika mendapatkan izin dari kementerian yang menaungi proyek tersebut. Jika pembangunan proyek ini tetap berjalan, pemerintah harus tetap menegakkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlu diingat bahwasanya boleh mengelola asalkan tetap melindungi yang namanya lingkungan hidup. Harus memperhatikan berbagai dampak di masa mendatang akibat pembangunan tersebut. Terlebih lagi proyek tersebut merupakan proyek yang besar dan jelas membutuhkan anggaran dana yang tidaklah sedikit. Harus diingat juga bahwasanya proyek ini bukan ditolak, melainkan ternyata masih ditunda. Tetapi tidak menutup kemungkinan proyek jika direalisasikan kembali justru akan ada gerakan lingkungan kembali sebagai bentuk protes serta kepedulian terhadap lingkungan. negara yang mempunyai dua fungsi yang berbeda, antara lain sebagai pengguna dan juga pelindung dari semua kekayaan alam justru abai terhadap lingkungan. Akibatnya, sering membuat negara tidak terpisah dari hal

yang berkaitan langsung dengan konflik kepentingan. Padahal, lingkungan mempunyai karakteristik dasar yang seharusnya juga diperhatikan. Sangat rasional jika lingkungan menjadi komponen energi untuk menghidupi politik demi kepentingan bersama. kebijakan pemerintah harus bisa melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai 10 nilai dasar dan tujuan yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk merumuskan kebijakan politik.

1.7. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah terpenting dalam sebuah penelitian yang tidak boleh terlewat oleh peneliti. Metode penelitian juga diartikan sebagai seperangkat langkah bagaimana suatu penelitian tersebut dilaksanakan (Hasan, 2002: 21). Ada beberapa komponen dalam metode penelitian, yaitu dari fokus penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik untuk menganalisis hasil data, serta catatan hambatan dalam pengumpulan data yang sudah dikumpulkan dari penelitian langsung ke lapangan. Semua komponen ini nantinya akan digunakan untuk menjawab serta mengidentifikasi suatu permasalahan yang sedang diteliti, yakni:

1.7.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar peneliti tidak keluar dari konteks pembahasan yang sedang diteliti. Fokus dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui respon dari kelompok kepentingan terhadap pembangunan *cable car* yang akan dibangun di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang diidentifikasi melalui sikapnya, strategi dalam membangun jejaringnya sebagai kekuatan, serta dinamika tarik – menarik yang terjadi antar kelompok kepentingan.

1.7.2. Tipe Penelitian

Lain halnya dengan tipe penelitian dalam skripsi ini, yakni penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara detail suatu keadaan yang sedang diteliti sesuai kenyataan secara benar sehingga menjadi sebuah pembahasan (Moleong, 2008). Penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis deskriptif, yang pada dasarnya penelitian kualitatif tersebut data yang dihasilkan berupa data deskriptif. Untuk data deskriptif ini nantinya bentuknya berupa data tulisan

bukan angka yang menginterpretasikan secara akurat dan faktual yang dijelaskan atau dideskripsikan sesuai dengan apa yang didapatkan dari hasil lapangan dari mulai pendapat, persepsi, ide dan lainnya (Sukardi, 2009: 157). Dalam penelitian ini, keadaan yang akan dijelaskan terkait kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan khususnya persoalan lingkungan. Dimana, nantinya akan ada pembahasan mengenai sikap, kemudian strategi membangun jejaring, dan dinamika tarik – menarik dalam memperjuangkan kepentingannya terlebih lagi dengan adanya proyek pembangunan pariwisata *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang pembangunannya bertujuan untuk meningkatkan laju kunjungan wisatawan.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk menemukan data informasi dari obyek penelitian sesuai dengan topik penelitian. Lokasi yang dipilih pun harus mempunyai karakteristik dengan topik yang dibahas. Sehingga nantinya akan ditemukan informasi dari obyek penelitian yang dianggap mampu menjelaskan terkait topik yang sedang diteliti. Penentuan lokasi penelitiannya sendiri didasarkan dengan tujuan penelitian yang hendak ingin dicapai sebagaimana untuk mengetahui kelompok kepentingan dalam menyikapi, strategi membangun jejaring, dan dinamika tarik - menarik yang terjadi dalam pembangunan *cable car* di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Pertimbangan mengambil lokasi tersebut dikarenakan Taman Wisata Alam Kawah Ijen berada di Kabupaten Banyuwangi.

1.7.4. Subyek Penelitian

Berbagai data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif-deskriptif berupa informasi didapatkan secara langsung dari narasumber yang disebut dengan informan. Peneliti menentukan informan berdasarkan kesesuaian dengan permasalahan yang sedang diteliti. Biasanya peneliti melakukan wawancara

dengan informan yang bersangkutan secara langsung guna mendapatkan data yang berkualitas. Adapun pihak yang akan diteliti sebagai subyek oleh peneliti, sebagai berikut :

1. WALHI Jawa Timur : Pak Pupung (Dewan Perwakilan WALHI Jawa Timur);
2. Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Banyuwangi : Pak Didik (Mantan Ketua Himpunan Pencinta Alam Banyuwangi), Pak Helmi (Ketua Aliansi Rakyat Miskin), Ir. HM Eko Sukartono (Mantan Ketua DPRD 2004 – 2009 dan Ketua Rejowangi);
3. Mahasiswa : Ardi Tyo Bastiar (Perwakilan BEM Universitas 17 Agustus 1945 di Kabupaten Banyuwangi);
4. Pekerja : Pak Mulyono (Penambang Belerang), Pak Yanto (Becak Troli), Pak Rizal (Becak Troli), dan Pak Ilzam (Becak Troli);
5. Seksi Konservasi Wilayah V BBKSDA Kabupaten Banyuwangi : Pak Purwantono (Kepala Seksi Konservasi Wilayah V BBKSDA Kabupaten Banyuwangi) dan Pak Sigit (Kepala *Resort* dan Petugas Lapangan);
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi : Pak Imron (Perwakilan Sekretariat Daerah);
7. Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi : Pak Salimi (Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi);
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi : Pak Darmanto (Bagian Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi);
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi : Ibu Husnul Khotimah (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi);
10. Pihak Swasta PT. Sura Parama Setia : Pak Dodi (Perwakilan dari PT Sura Parama Setia di Kabupaten Banyuwangi).

Kemudian, data yang sudah diperoleh dari beberapa informan tersebut akan diolah lagi oleh peneliti untuk memperoleh jawaban yang juga berkualitas dari permasalahan yang sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian oleh peneliti.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu komponen dalam metode penelitian yang strategis dan tidak boleh terlewatkan oleh peneliti. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi :

- a. *Data Primer*: Data yang berhasil didapatkan secara langsung dari informan pertama tanpa perantara di lapangan oleh peneliti yang memerlukan data melalui teknik wawancara (Hasan, 2002: 82).

Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data primer, yakni :

1. Wawancara : Memang benar dalam penelitian kualitatif-deskriptif cenderung menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) dengan informan. Wawancara sendiri diartikan salah satu teknik pengumpulan data lewat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber dan nantinya jawaban yang diberikan narasumber direkam seraf dicatat dengan alat pendukung wawancara (Soehartono, 2011: 68). Dengan cara ini memang mengharuskan peneliti bertatap muka langsung dengan informan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang sudah tercatat sebagai subyek penelitian dan tentunya terkait langsung dengan pembahasan yang sedang diteliti, yakni pembangunan *cable car* di Taman Wisata Alam Kawah Ijen

dibandingkan observasi langsung ke kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan saat ini. Untuk hasil yang didapatkan dari wawancara secara mendalam yang sudah terkumpul harus ditranskripkan terlebih dahulu sebelum nanti dilanjutkan untuk dianalisis datanya.

- b. Data *Sekunder*: Kalau untuk data sekunder itu adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada untuk bisa dipakai sebagai penguat data primer yang telah didapatkan secara langsung dari sumber pertama (Hasan, 2002: 58). Berikut penjelasan mengenai teknik untuk mengumpulkan data sekunder, yakni :
 1. Dokumentasi : Data yang berguna untuk memperkuat data primer dan mempunyai peran besar untuk bisa membantu ketika proses analisis data dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lampiran – lampiran foto dan data dokumen yang berhasil didapatkan dari hasil wawancara dengan informan.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Data penelitian nantinya dianalisis menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung atau ketika seluruh proses pengumpulan data sudah selesai. Analisis data dilakukan berkaitan dengan seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Tujuannya agar memperoleh gambaran realitas sosial dan mengetahui makna dari informan melalui semua pernyataan – pernyataan yang sudah dikemukakan (Bungin, 2008: 153). Berikut ini tahapan proses untuk menganalisis data hasil temuan yang terdapat tiga alur menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan (reduksi data) : Merupakan proses peneliti untuk melakukan penyederhanaan data secara awal setelah semua data berhasil

dikumpulkan. Nantinya yang dilakukan adalah dengan membuat rangkuman yang berisi inti, proses, dan pernyataan yang harus tetap ada dalam pembahasan. Kemudian, ada tahapan selanjutnya mengkategorikan sesuai dengan yang sama dan memilih data yang pokok untuk dijelaskan secara rinci. Maka dari itu, nantinya diperoleh gambaran jawaban yang jelas mengenai rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti terkait kelompok kepentingan dalam menyikapi, strategi membangun jejaring, dan dinamika yang terjadi dalam pembangunan *cable car* yang akan dibangun di Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

- b. Tahapan berikutnya adalah proses Penyajian Data : Nantinya data yang sudah diperoleh dipaparkan dengan cara menyusun data menjadi satu kesatuan yang utuh. Biasanya dalam bentuk uraian singkat, teks, maupun grafik/diagram atau lainnya. Dalam proses ini data dianalisis secara mendalam, sehingga dapat diketahui antara data satu dengan data yang lain saling berkaitan. Sedangkan, penelitian ini sendiri dalam proses penyajian data dilakukan dengan cara menjelaskan dalam bentuk narasi dari informan yang kemudian dilengkapi dengan adanya data pendukung yang diperoleh dari informan atau sumber lainnya.
- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi) : Kegiatan ini dilakukan dengan cara menulis makna - makna yang muncul dari data yang sedang diteliti agar data penelitian baik kebenaran, keutuhan, dan kecocokan tetap terjaga kualitasnya. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian harus dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya (Sugiyono, 2014: 246 - 253).

Akan tetapi, ketika proses menganalisis data diawali terlebih dahulu dengan mentranskrip data hasil wawancara. Kemudian, dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan diatas. Nantinya dengan data – data tersebut, akan diperoleh data yang ilmiah.

1.8. Catatan Hambatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi tidak semua data bisa didapatkan secara mudah. Tentunya ada berbagai hambatan yang dirasakan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan untuk bisa mendapatkan data informasi dari narasumber yang sudah ditentukan. Perlu diketahui bahwasanya skripsi ini memiliki catatan hambatan penelitian dari salah satu pihak yang menjadi informan, yakni Pak Dodi selaku perwakilan pihak swasta PT. Sura Parama Setia. Ada beberapa hambatan ketika proses pengumpulan data melalui wawancara dengan Pak Dodi. *Pertama*, susahny mencari data informasi profil tentang PT. Sura Parama Setia atau intinya minim data yang didapat melalui riset internet. *Kedua*, berkas berisi surat izin untuk wawancara yang peneliti kirimkan ke alamat yang didapatkan melalui internet menggunakan layanan Pos Indonesia ke kantor pusat dari perusahaan tersebut yang berada di Jakarta, namun tidak sampai. Hal ini dikarenakan menurut pihak Pos Indonesia alamatnya yang tertulis salah. Kemudian, informasi data berhasil didapatkan melalui Seksi Konservasi Wilayah V BBKSDA Jawa Timur di Banyuwangi berupa nama dan juga nomor perwakilan dari perusahaan tersebut yang ada di Banyuwangi. Sayangnya, Pak Dodi sebagai yang menjadi perwakilan perusahaan tidak mau untuk diwawancarai, karena harus ada izin dari pusat. Tapi, sebelumnya pihak swasta sendiri sudah menanyakan perihal topik yang dibahas dalam skripsi peneliti dan pihak swasta sendiri menanyakan bagaimana peneliti bisa mendapatkan informasi bahwa PT. Sura Parama Setia yang akan membangun *cable car* di Kawah Ijen. Terlebih lagi terkendala kondisi saat ini yang tidak mendukung karena virus *corona* yang mengharuskan semua orang untuk menerapkan *social distancing*. Sehingga data dari pihak PT. Sura Parama Setia tidak bisa didapatkan. Melainkan, bisa didapatkan dari beberapa pernyataan pihak yang juga merupakan subyek penelitian dan mengetahui beberapa informasi tentang PT. Sura Parama Setia yang berperan penting dalam rencana pembangunan *cable car* tersebut.